

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Shinta. *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: LeIP, 2014).
- Asshiddiqie, Jimly. *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi*. (Padang: Seminar Indonesia-Malaysia, 2010).
- Bothlingk, F.R. *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*. (Gravenhage: Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon S-Gravenhage, 1954).
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Gie, The Liang. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 1968).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Hartini, Sri dkk. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
- Mamudy, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali pers, 2001).
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005).
- Minarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

- N.D, Mukti, Fajar dan Yulianto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Noah, Sidek Mohd. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*. (Serang: Universiti Putera Malaysia, 2002).
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi. (Jakarta: Grasindo, 2005).
- Pide, Andi Mustari. *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999).
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001).
- Ridwan. *Hukum Administrasi di Daerah*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).
- Saragih, Bintan R. *Peranan DPR GR Periode 1965-1971 dalam Menegakkan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945*. (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1991).
- Setiawan, Dian Bakti. *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- Sjahnan, H. R. *Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Otonomi Menurut Undang- Undang Dasar 19945 di Indonesia*. (Medan; Monara, 1992).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneltian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986).
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UII-Press), 2006).
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. (Bandung: Alumni, 1987).
- Soetomo. *Hukum Kepegawaian dalam Praktek*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1987).
- Suharman. *Pisikologi Kognitif*, Edisi Revisi. (Surabaya: Srikandi Ghalia, 2005).

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Syafei, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2001).

_____. *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013).

Ukusumo dan E. Bonn-Sosro. *Tuntutan Pidana*. (Jakarta: Siliwangi, 2007).

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden*, Edisi Revisi. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

B. Kamus

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-4, Cetakan Ke-1. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Hasan, Alwi dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ketiga. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005).

Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Simorangkir, J.C.T *Kamus Hukum*. (Jakarta: Aksara Hukum, 1983).

C. Peraturan Perundang-Undang

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160).
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121).
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480).

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344).

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564).

Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu*.

Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu*.

D. Artikel

Abdullah, Edi. "Kabinet Jokowi-JK Terdiri 34 Kementerian dan Berikut Nama yang kemungkinan Mengisi Kabinet". <https://www.kompasiana.com/171717/54f8930ca333118a178b4596/kabinet-jokowijk-terdiri-34-kementerian-dan-berikut-nama-yang-kemungkinan-mengisi-kabinet>, 15 Maret 2019.

Gabrillin, Abba. "Kronologi OTT Bupati Nganjuk yang Diamankan di Sebuah Hotel Tak Jauh dari Istana". <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/26/18314171/kronologi-ott-bupati-nganjuk-yang-diamankan-di-sebuah-hotel-tak-jauh-dari?page=all>, 30 Juli 2019.

Nadlir, Mohammad. "'Bupati Nganjuk Diberhentikan Sementara, Wabup Ditunjuk Jadi Plt". [https://nasional.kompas.com/read/2017/10/27/08073011/bupati-nganjuk-diberhentikan-sementara-wabup-ditunjuk-ja di-plt](https://nasional.kompas.com/read/2017/10/27/08073011/bupati-nganjuk-diberhentikan-sementara-wabup-ditunjuk-ja-di-plt), 30 Juli 2019.

Kuswandi. "ICW: Ada yang Janggal dari Surat Pemberhentian Bupati Nganjuk". <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/05/2018/icw-ada-yang-janggal-dari-surat-pemberhentian-bupati-nganjuk>, 1 April 2019.

Saragi, Marry Margaretha. “*Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/>. 17 Juni 2019.

Setiawan, Adam. “*Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*”. <https://www.kompasiana.com/adamsetiawan/5b6572e5ab12ae715836da22/tanggung-jawab-jabatan-dan-tanggung-jawab-pribadi-dalam-penyelenggaraan-urusan-pemerintahan?page=all>, 17 Juni 2019.

E. Jurnal

Hadjon, Philipus Mandiri. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

Kumayas, Farry Christian. “Pemilihan Serta Pengangkatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota”. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 3 April 2015.

Nuh, H. Muhammad Syarif. “Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41 Nomor 1 Tahun 2012*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.

F. Putusan

Putusan 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SBY.

G. Keputusan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1561 Tahun 2018